**ABSTRAK**

Orang terlantar termasuk dalam Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Gelandangan dan pengemis patut dipertanyakan apakah sudah terdata secara berkala oleh Tim Pendataan dan telah memiliki dokumen kependudukan atau belum. Usulan penelitian ini sangat terkait dengan berbagai masalah yang terjadi di tempat magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (DUKCAPIL Jambi). Untuk lebih jelas permasalahan diatas penulis rumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan bagi gelandangan dan pengemis di Kota Jambi. (2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan bagi gelandangan dan pengemis di Kota Jambi Provinsi Jambi?. (3) Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat DUKCAPIL Jambi dalam penertiban dokumen kependudukan bagi gelandangan dan pengemis?.

Penertiban diartikan juga sebagai sebuah usaha atau upaya dalam suatu proses untuk membuat sesuatu menjadi lebih teratur dengan melihat kinerja pemerintah dan aparatur, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tinjauan legalistik yang dipakai dalam penulisan ini diatur dalam Undang-undang dan peraturan menteri terkait administrasi kependudukan. Metode Penulisan laporan akhir ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. DUKCAPIL Jambi melaksanakan penertiban sesuai aturan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja. Hambatan-hambatannya, antara lain belum ada koordinasi dan kerjasama antar dinas, terkendala dana, minimnya kuantitas dan kualitas pegawai, perbedaan presepsi akan keberadaan gelandangan dan pengemis, dan belum adanya prosedur penerbitan dokumen kependudukan yang mudah dipahami. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan intensitas dan kualitas dari sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan penerbitan kepada intern dinas, antar dinas, dan masyarakat, bersinergi dan berkoordinasi dengan dinas terkait dan kelompok sasaran pelaksanaan penerbitan, menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas bagi pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pra-sarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

***ABSTRACT***

*Displaced people is one of the population of vulnerable administration. Homeless and beggars are questionable whether it has been recorded periodically by the Data Collection Team and have had the document of residence or not.* *The proposal of this research is closely related to the various problems that occurred in the place of apprenticeship at the Department of Population and Civil Registration of Jambi City (DUKCAPIL Jambi). For more clearly of the problems* *the author formulates as follows: (1) How the implementation of the demotion of population documents for homeless and beggars in the city of Jambi.* *(2) What factors are the obstacles in the implementation of demotion of population documents for homeless and beggars in Jambi City of Jambi Province ?.* *(3) What efforts are made by DUKCAPIL Jambi apparatus in controlling population documents for homeless and beggars ?.*

*Controlling* *is also interpreted as an attempt or effort in a process to make things more orderly by looking at the performance of the government and the apparatus, in accordance with applicable regulations.* *In the legalistic review used in this writing is regulated in the laws and regulations of ministers related to population administration.* *Writing method of this final report is descriptive qualitative research method with inductive approach. DUKCAPIL Jambi do law enforcement according to the rules to accelerate and improve performance.* *The obstacles, among others, is that there has been no coordination and cooperation between agencies, constrained funds, the lack of quantity and quality of employees, differences in perceptions of the existence of homeless and beggars, and the absence of procedures for the publication of documents that are easily understood. The efforts* *can be done for instace,* *increasing the intensity and quality of the socialization of regulations related to the implementation of the issuance to the internal offices, between agencies, and the community, in synergy and coordination with relevant agencies and target groups implementation of publication, conducting training in order to improve the quality for employees, increasing the quantity and quality of facilities and pre-facilities in order to support the implementation of Population Registration and Civil Registration.*